



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1727/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Para Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang
(sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 15602/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025)
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15602/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Belum Tertib, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Para Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud untuk:

- 1) Selaku Kuasa Pengguna Barang untuk:
 - a) Segera mengajukan usulan persetujuan sewa Barang Milik Negara (BMN) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui Pengadilan Tingkat Banding dan/atau penilaian penetapan besaran nilai sewa kepada Sekretaris Mahkamah Agung; dan
 - b) Lebih cermat dalam mengajukan usul pemanfaatan BMN kepada KPKNL melalui Pengadilan Tingkat Banding dan/atau penetapan nilai sewa kepada Sekretaris Mahkamah Agung dalam membuat perjanjian sewa setelah memperoleh penetapan status penggunaan BMN dari Sekretaris Mahkamah Agung, dan dalam menentukan tarif sewa rumah negara;
- 2) Memedomani Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa BMN Non Rumah

Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan

- 3) Memedomani Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara sebagai dasar pengenaan tarif sewa rumah negara.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

 Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15602/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Belum Tertib, dengan ini memerintahkan kepada Sekretaris Satuan Kerja terkait:

- 1) Selaku Kuasa Pengguna Barang untuk:
 - a) Segera mengajukan usulan persetujuan sewa Barang Milik Negara (BMN) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui Pengadilan Tingkat Banding dan/atau penilaian penetapan besaran nilai sewa kepada Sekretaris Mahkamah Agung; dan
 - b) Lebih cermat dalam mengajukan usul pemanfaatan BMN kepada KPKNL melalui Pengadilan Tingkat Banding dan/atau penetapan nilai sewa kepada Sekretaris Mahkamah Agung dalam membuat perjanjian sewa setelah memperoleh penetapan status penggunaan BMN dari Sekretaris Mahkamah Agung, dan dalam menentukan tarif sewa rumah negara;
- 2) Memedomani Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa BMN Non Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan
- 3) Memedomani Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara sebagai dasar pengenaan tarif sewa rumah negara.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
9. Yth. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
10. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
11. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait; dan
12. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

A.2.e1)a)b)2)3)



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Nomor : 15602/SEK/PW1.4/X/2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No.	Nama Satuan Kerja
1.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
2.	Pengadilan Negeri Nunukan
3.	Pengadilan Agama Jakarta Timur
4.	Pengadilan Negeri Bale Bandung
5.	Pengadilan Negeri Pamekasan
6.	Pengadilan Agama Jombang
7.	Pengadilan Negeri Palembang
8.	Pengadilan Agama Lubuk Linggau
9.	Pengadilan Negeri Watampone
10.	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung
11.	Pengadilan Negeri Bintuhan
12.	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
13.	Pengadilan Agama Jakarta Barat
14.	Pengadilan Negeri Denpasar
15.	Pengadilan Negeri Wonosari
16.	Pengadilan Negeri Soasio
17.	Pengadilan Negeri Gianyar
18.	Pengadilan Negeri Muara Enim
19.	Pengadilan Agama Sampang
20.	Pengadilan Negeri Singkawang
21.	Pengadilan Agama Tanjungpinang
22.	Pengadilan Negeri Airmadidi
23.	Pengadilan Negeri Kayu Agung

No.	Nama Satuan Kerja
24.	Pengadilan Negeri Negara
25.	Pengadilan Tinggi Jambi
26.	Pengadilan Negeri Martapura
27.	Pengadilan Negeri Madiun
28.	Pengadilan Negeri Merauke
29.	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
30.	Pengadilan Negeri Sidikalang
31.	Pengadilan Negeri Tuban
32.	Pengadilan Negeri Baturaja
33.	Pengadilan Negeri Magelang
34.	Pengadilan Negeri Klaten
35.	Pengadilan Negeri Sarolangun
36.	Pengadilan Tinggi Jakarta
37.	Pengadilan Negeri Ambon
38.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
39.	Pengadilan Agama Kab. Kediri
40.	Pengadilan Negeri Lamongan
41.	Pengadilan Negeri Kisaran
42.	Pengadilan Negeri Sungailiat
43.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
44.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
45.	Pengadilan Negeri Karanganyar
46.	Pengadilan Negeri Slawi
47.	Pengadilan Agama Giri Menang
48.	Pengadilan Agama Sambas
49.	Pengadilan Agama Cibinong
50.	Pengadilan Agama Kalianda
51.	Pengadilan Negeri Sibolga

No.	Nama Satuan Kerja
52.	Pengadilan Militer III-12 Surabaya
53.	Pengadilan Negeri Gunungsitoli
54.	Pengadilan Negeri Tenggara
55.	Pengadilan Negeri Makassar
56.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
57.	Pengadilan Negeri Sinjai
58.	Pengadilan Negeri Ternate
59.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
60.	Pengadilan Negeri Karawang
61.	Pengadilan Negeri Padang
62.	Pengadilan Tinggi Gorontalo
63.	Pengadilan Negeri Samarinda
64.	Pengadilan Tinggi Bandung
65.	Pengadilan Negeri Kolaka
66.	Pengadilan Negeri Tanjung Pati
67.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
68.	Pengadilan Negeri Belopa
69.	Pengadilan Agama Kajen
70.	Pengadilan Negeri Sumedang
71.	Pengadilan Negeri Tasikmalaya
72.	Pengadilan Agama Gorontalo
73.	Pengadilan Agama Magelang
74.	Pengadilan Negeri Purworejo
75.	Pengadilan Negeri Bantaeng
76.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
77.	Pengadilan Negeri Kupang
78.	Pengadilan Negeri Bontang
79.	Pengadilan Negeri Kediri

No.	Nama Satuan Kerja
80.	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
81.	Pengadilan Militer I-04 Palembang
82.	Pengadilan Negeri Sungguminasa
83.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang
84.	Pengadilan Agama Palembang
85.	Pengadilan Negeri Wonosobo
86.	Pengadilan Negeri Poso
87.	Pengadilan Negeri Bekasi
88.	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
89.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
90.	Pengadilan Negeri Sambas
91.	Pengadilan Agama Kota Madiun
92.	Pengadilan Agama Purbalingga
93.	Pengadilan Negeri Kutai Barat
94.	Pengadilan Agama Sumenep
95.	Pengadilan Negeri Buntok
96.	Pengadilan Negeri Sekayu
97.	Pengadilan Negeri Purwokerto
98.	Pengadilan Negeri Baubau
99.	Pengadilan Agama Baubau
100.	Pengadilan Agama Rengat
101.	Pengadilan Negeri Sukabumi
102.	Pengadilan Negeri Penajam
103.	Pengadilan Negeri Pinrang
104.	Pengadilan Negeri Pelaihari
105.	Pengadilan Negeri Cilacap
106.	Pengadilan Negeri Painan
107.	Pengadilan Agama Tulungagung

No.	Nama Satuan Kerja
108.	Pengadilan Negeri Koto Baru
109.	Pengadilan Agama Banjarnegara
110.	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
111.	Pengadilan Agama Jember
112.	Pengadilan Negeri Tarakan
113.	Pengadilan Militer III-14 Denpasar
114.	Pengadilan Negeri Purwodadi
115.	Pengadilan Negeri Tabanan
116.	Pengadilan Tinggi Kupang
117.	Pengadilan Negeri Sengkang
118.	Pengadilan Negeri Bengkulu
119.	Pengadilan Negeri Tais
120.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
121.	Pengadilan Negeri Singaraja
122.	Pengadilan Negeri Pasuruan
123.	Pengadilan Negeri Bangkinang
124.	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
125.	Pengadilan Negeri Kalianda
126.	Pengadilan Negeri Banjarbaru
127.	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
128.	Pengadilan Negeri Wangi Wangi
129.	Pengadilan Negeri Serang
130.	Pengadilan Negeri Maros
131.	Pengadilan Negeri Tebo
132.	Pengadilan Negeri Banyuwangi
133.	Pengadilan Negeri Bangli
134.	Pengadilan Negeri Waikabubak
135.	Pengadilan Negeri Dumai

No.	Nama Satuan Kerja
136.	Pengadilan Negeri Metro
137.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
138.	Pengadilan Agama Lahat
139.	Pengadilan Agama Lumajang
140.	Pengadilan Negeri Muara Bulian
141.	Pengadilan Negeri Semarang
142.	Pengadilan Negeri Dompu
143.	Pengadilan Negeri Tahuna
144.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
145.	Pengadilan Militer Utama
146.	Pengadilan Negeri Tegal
147.	Pengadilan Negeri Surabaya
148.	Pengadilan Agama Ambon
149.	Pengadilan Agama Karawang
150.	Pengadilan Agama Bogor
151.	Pengadilan Agama Cibadak

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

A.2.e1)a)b)2)3)



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN